

## **RESPON PETANI ATAS KEMISKINAN STRUKTURAL (Kasus Desa Perkebunan dan Desa Hutan)**

**Heru Purwandari**

*Staf Pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,  
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor  
Email: heru.purwandari@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*Governmental development paradigm during the time in bearing with experienced resources management had marginalized and impoverished certain groups in the society. This condition make a structural poverty which emergence from inequality resources access between elite and peasant. Inequality cause the marjinalization of the society, and its implication to the empowerment of the society itself. Respon of the structural poverty has shown through two community are forest village and plantation village. That communities have different characteristic and the implications different too. But, the goal of respons have a same is out from structural condition.*

*Key Words: structural poverty, inequality access resources, respons of structural poverty*

### **PENDAHULUAN**

Pembahasan kemiskinan struktural menjadi penting dalam kaitannya dengan upaya mengatasi ketimpangan yang selama ini terjadi pada masyarakat kelas bawah. Kondisi ini terjadi pada hampir sebagian besar sektor produksi di Indonesia. Kemiskinan struktural pada masyarakat desa hutan dan masyarakat desa perkebunan diawali oleh paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang berhaluan kapitalisme dimana materi menjadi ukuran keberhasilan, serta paradigma yang mengatakan bahwa negara sama dengan pemerintah sehingga pengelolaan sumberdaya alam oleh negara diartikan sebagai pengelolaan sumberdaya alam oleh pemerintah (*government based resource management*).

Pendekatan tersebut berdampak tidak saja pada pemerintah melainkan juga pada masyarakat. Dampak yang terjadi pada pemerintah dapat ditinjau pada dua sisi yaitu kebijakan dan perilaku. Kebijakan-kebijakan yang ada baik berupa hukum perundang-undangan dan program-program yang dilakukan berakar pada dua paradigma diatas. Dari sisi perilaku, ada tiga hal yang bisa dilihat yaitu persepsi pemerintah terhadap kemampuan masyarakat cenderung bersifat rendah tolok ukur (bagaimana mengevaluasi kinerja dan siapa yang

mengevaluasinya), serta struktur peran rakyat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi (KIKIS, 2000a).

Bagi masyarakat, paradigma yang dipilih pemerintah berakibat pada berkurangnya kemandirian petani secara ekonomi yang secara lebih jauh mengakibatkan masyarakat kehilangan hak (akses dan kontrol) menguasai dan mengelola hutan. Kedua paradigma diatas juga menyebabkan erosi solidaritas, rasa kekeluargaan yang lebih jauh menyebabkan ketidakberdayaan melawan intervensi namun juga memiliki sisi positif yaitu peningkatan kapasitas (keterampilan) dalam upaya mendorong perubahan. Kondisi diatas memicu reformasi sosial kelas menengah misalnya PT, LSM, kelas menengah kota, media massa, pengusaha dan birokrat untuk menghilangkan segala bentuk ketimpangan yang terjadi.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dapat menyebabkan konflik. Pemerintah sering menganggap hutan sebagai kekayaan alam yang sangat potensial untuk menghasilkan uang negara oleh karena itu penguasaan terhadap hutan adalah mutlak oleh negara dan pengelolaannya pun semata-mata demi kepentingan negara (nasional). Berbeda dengan anggapan masyarakat lokal tentang

hutan dimana makna hutan sebagai *public property* menyebabkan setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberadaan dan kelangsungan fungsi hutan tersebut, sekaligus setiap orang juga memiliki hak yang sama pula untuk mengambil manfaat dari hutan, khususnya untuk kepentingan subsistensi mereka.

Bagi masyarakat yang berada pada kawasan perkebunan, kemiskinan struktural muncul dengan dibuktikan melalui terpuruknya perekonomian masyarakat yang semula memiliki akses terhadap sumberdaya lahan. Sebagai akibat pengambilalihan lahan secara paksa oleh perkebunan, kehidupan petani menjadi menurun sekaligus memunculkan ketimpangan akses sumberdaya lahan. Sejarah kemiskinan demikian telah dipotret dalam tulisan Tauchid (1953) ketika Indonesia lepas dari penjajahan kolonial dan masuk pada era Republik.

Lain halnya yang terjadi pada konteks kehutanan dan perkebunan, penciptaan kemiskinan terhadap komunitas dipertahankan sebagai upaya menciptakan ketergantungan masyarakat lokal terhadap pemilik modal sekaligus mempertahankan status quo agar pemenuhan tenaga kerja masih dapat diakses dari masyarakat lokal. Masyarakat sekitar perhutani/kehutanan dan perkebunan tetap diposisikan sebagai kaum marjinal yang tidak memiliki kemampuan melepaskan diri dari ikatan. Melalui posisi tersebut, komunitas dijauhkan dari kesadaran kritis yang dianggap mampu membawa sosialisasi terbentuknya jaringan dengan orang di luar komunitasnya.

Fokus kajian ini akan diarahkan untuk melihat kemiskinan struktural yang terjadi pada dua komunitas yaitu masyarakat dalam/sekitar hutan yang didefinisikan sebagai masyarakat lokal/adat/asli yang berdomisili di dalam/sekitar hutan secara turun temurun dan menjadi bagian dari ekosistem, budaya, sosial, religi dengan hutan. Komunitas lain yang juga tak kalah menariknya adalah komunitas desa perkebunan. Masyarakat yang dianalisis pada kasus ini adalah masyarakat yang masih tinggal disekitar perkebunan, menjadi buruh perkebunan sekaligus melakukan kegiatan pertanian pada kawasan yang ditetapkan oleh perkebunan.

Sebagai komunitas yang tinggal pada dua kondisi alam yang berbeda namun dengan ciri kemiskinan struktural yang sama dalam konteks penyebab kemiskinan yang berbeda, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang: bagaimana bentuk kemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat pada komunitas desa perkebunan dan komunitas desa hutan, bagaimana kaitan struktur masyarakat dengan kemiskinan struktural, dan bagaimana respons masyarakat terhadap kemiskinan struktural yang terjadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Memahami kemiskinan struktural merupakan upaya untuk memahami struktur masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada akumulasi fokus kajian pada bagaimana struktur masyarakat dapat melahirkan kondisi kemiskinan struktural. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kemiskinan struktural yang muncul pada komunitas petani sekaligus respons yang ditimbulkannya, perlu pemahaman teori-teori yang akan dipaparkan di bawah ini.

### *Petani : Tinjauan Kasus*

Dasar teoritis yang berupaya membedakan petani dengan komunitas lain dapat diperoleh dari tulisan Eric Wolf (1985). Dalam bukunya, Wolf menggambarkan petani sebagai orang desa yang bercocok tanam. Jadi siapapun kelompok masyarakat yang melakukan usaha pertanian dapat dikategorikan sebagai petani. Dalam kasus buruh tani, Yunus Nasution menggambarkan bahwa buruh tani berposisi sebagai kelas pekerja yang “setengah” petani. Sehingga penekanan gerakan yang dilakukan aktivis LSM adalah melaksanakan *landreform* atas inisiatif masyarakat sendiri. Mereka memiliki kesadaran sebagai kelas petani dan bukan kelas buruh.

Petani Jawa memiliki karakteristik yang khas yakni pelapisan sosial tradisional berdasarkan kriteria kepemilikan atas tanah. Kriteria kepemilikan tanah telah menjadi dasar bagi berbagai klasifikasi struktur warga desa di Jawa. Klasifikasi itu kemudian membedakan warga desa menjadi:

1. Kelompok warga desa inti (*bakul, gogol atau pribumi*) sebagai keturunan para

perintis dan pembuka desa. Kelompok ini memiliki rumah serta kewajiban penuh sebagai warga desa.

2. *Indung*, yaitu mereka yang memiliki sebidang tanah pertanian atau rumah tetapi tidak kedua-duanya. Indung memiliki hak dan kewajiban terbatas.
3. *Nusuo, tlosor* atau *bujang*. Kelompok ini tidak memiliki tanah ataupun rumah. Mereka bertempat tinggal di pekarangan orang lain, bekerja sebagai penyewa tanah, petani kecil.

Pelapisan tersebut berpengaruh pada pengambilan keputusan ketika komunitas mengalami permasalahan baik intern maupun ekstern. Tampak bahwa pelapisan didasarkan pada kepemilikan tanah yang menunjukkan bahwa tanah menjadi sebuah sesuatu yang sangat dihargai secara materiil maupun secara moral. Tidak memiliki tanah secara lebih jauh akan mengakibatkan kondisi masyarakat yang bersangkutan kehilangan ciri pedesaan. Dalam penelitiannya, Pelzer (1991) bahkan menemukan sengketa yang terjadi antara pengusaha perkebunan melawan petani dari zaman Belanda sampai dilakukannya nasionalisasi berakar pada masalah tanah.

### ***Kapitalisme dalam konteks kehutanan dan perkebunan***

Ciri khas kapitalisme adalah penguasaan modal oleh kapitalis, sementara tanah dan tenaga kerja sebagai faktor produksi terpisah satu sama lain. Kapitalisme dalam dua bentuk yaitu kapitalisme swasta dan kapitalisme negara memberi pengaruh yang berbeda terhadap keberadaan masyarakat petani. Kapitalisme swasta bercirikan bahwa modal dimiliki swasta dan didalamnya terdapat mekanisme pasar. Kapitalisme negara ditunjukkan oleh fakta bahwa modal dimiliki oleh negara sedangkan ketersediaan tenaga kerja berasal dari masyarakat tanpa upah.

Pendekatan pengelolaan sektor kehutanan yang berparadigma ekofasis memungkinkan akumulasi modal pada pihak-pihak yang berada pada kelompok elit. Kecenderungan tersebut didukung oleh kepentingan politik negara yang membuka keran investasi dalam sektor kehutanan. Bukti empiris membuktikan bahwa ketika kebijakan kehutanan diluncurkan, semisal

HPH dan HTI, dalam banyak hal mengakibatkan terputusnya masyarakat lokal dengan hutan.

Kapitalisme yang dimaksud dalam hal ini adalah kapitalisme warisan kolonialisme. Berbeda dengan kapitalisme di Amerika dan Eropa, kapitalisme Indonesia yang tumbuh dengan ciri pinggiran menciptakan diferensiasi sosial, yang merupakan konsekuensi perkembangan kapitalisme. Sisi lain dari hukum akumulasi modal dari kapitalisme adalah berlangsungnya proletarisme petani (proses pemisahan petani dari alat produksinya, yakni tanah, menuju terbentuknya buruh).

Intervensi kapitalisme klasik membawa pengaruh yang berbeda atas respon yang muncul pada masyarakat perkebunan dan kehutanan. Pada masyarakat kehutanan, respon lebih kearah bagaimana mereka dapat akses terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Pada masyarakat desa hutan yang berada di dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan, pola kepemilikan lahan masih tetap dipertahankan namun respon yang timbul tidak terlalu radikal, meskipun perjuangan diarahkan tidak saja pada pengelolaan sumberdaya alam namun juga pada perjuangan aspek legalitas lahan yang mereka tempati. Persoalan yang khas adalah masyarakat desa hutan biasanya terlibat benturan tentang garis batas antara lahan milik adat dan lahan milik kehutanan.

Berbeda dengan desa perkebunan, kapitalisme yang muncul memiliki ciri seperti yang diungkapkan Wiradi (1999), yaitu:

1. Sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi pertanian harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional
2. Perkebunan besar menguasai tanah yang luasnya tak terbatas, atau tak dibatasi
3. Kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang ada di pasar
4. Karena itu diciptakan mekanisme '*extra pasar*' atau '*non pasar*' (budak belian, kuli kontrak, transmigrasi, dan sejenisnya)
5. Pengelolaan perkebunan besar sangat ketat, dan cenderung bengis.

6. Birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrol sosial, karena perkebunan besar merupakan 'enclave' yang terisolasi dari masyarakat (kecuali tebu, di Jawa)

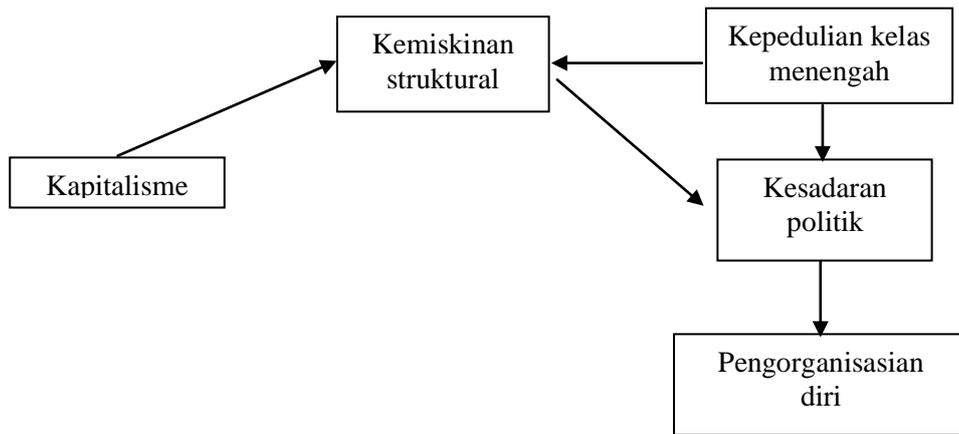
Ciri kapitalisme menyebabkan masyarakat tersingkir dari lahannya, kehilangan mata pencaharian hidup sehingga masyarakat cenderung termarjinalisasi.

**Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan diartikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia seperti kebutuhan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Berbeda dengan konsep kemiskinan struktural yang diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang timbul sebagai akibat struktur sosial yang rumit yang menyebabkan masyarakat termarjinalisasi dan sulit memperoleh akses terhadap berbagai peluang.

Kemiskinan dan kemiskinan struktural dapat dikaji melalui unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat yang menurut Soekanto meliputi: kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kekuasaan dan wewenang. Dari sana kita dapat memperoleh gambaran bagaimana bagian-bagian dalam struktur tersebut menjadi penting untuk menggambarkan terjadinya kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural akan ditunjukkan melalui unsur-unsur pokok tersebut dimana ketika kemiskinan struktural terjadi pada masyarakat, terdapat perubahan kondisi yang terjadi disebabkan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Masuknya unsur asing yang menjadi penyebab kemiskinan struktural membawa pengaruh kepada pola adaptasi yang harus mereka terapkan.



Gambar. 1 Terjadinya Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural yang terjadi pada dua komunitas dipicu oleh adanya kapitalisme yang merasuki seluruh sektor, diantaranya adalah sektor perkebunan dan kehutanan. Kemiskinan struktural akan berbeda bentuk tergantung dari struktur sosial masyarakat dan juga tergantung pada pihak penguasa yang bermain dalam komunitas tersebut. Respon atas kemiskinan struktural diilhami oleh kondisi masyarakat dimana mereka dalam kondisi

termarjinalisasi dan dalam posisi struktur sosial yang timpang sehingga mereka dalam kondisi miskin dan dimiskinkan.

Respon diwujudkan dalam bentuk konsolidasi petani dalam wilayahnya termasuk juga konsolidasi kekuatan untuk melawan kondisi yang disebabkan oleh faktor struktural. Lahirnya pengorganisasian petani berbeda-beda terkait dengan bentuk kemiskinan yang mereka alami.

## **Kemiskinan Struktural: Kasus Perkebunan dan Kehutanan**

### ***Kasus Kemiskinan Struktural Perkebunan***

Buruh perkebunan adalah petani yang termarginalisasi sehingga banyak LSM memfokuskan perhatian pada masalah tanah ditambah dengan ciri kesadaran buruh tani yang mengarah sebagai petani, bukan buruh. Buruh tani muncul sebagai akibat dari ketidakadilan penguasaan berbagai sumber agraria. Buruh tani diklasifikasikan sebagai *landless*, yaitu petani yang tidak memiliki lahan.

Kasus buruh perkebunan tidak terlalu berbeda dengan kasus buruh tani. Beberapa memang bekerja di perkebunan sebagai buruh perkebunan. Namun hampir sebagian besar penduduk mengelola lahan di sekitar perkebunan yang tidak digarap. Kondisi demikian berimplikasi kepada struktur masyarakat yang cenderung berbasis pertanian.

### *Struktur Masyarakat*

Golongan miskin cenderung berada pada daerah dengan kondisi alam yang rata-rata tidak mendukung. Kebanyakan dari petani yang hidup dalam kondisi geografis tersebut memilih untuk bertahan tanpa pernah berupaya merubah nasib misalnya dengan cara pindah ke daerah lain. Dalam kondisi demikian, lahan menjadi satu-satunya sandaran hidup dan sumber penghasilan. Ketika lahan tersebut diambil alih oleh golongan lain yang terjadi adalah petani kehilangan sumber hidupnya. Pada kurun waktu tertentu mereka dapat bertahan karena masih dapat bekerja pada perusahaan perkebunan yang mengambil alih lahan tersebut. Namun di sisi lain, romantisme kehidupan sebelum lahan tercabut dari tangan mereka memicu keinginan untuk kembali memperjuangkan lahan yang sesungguhnya berada sangat dekat.

Terkait dengan kondisi geografis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, petani yang tinggal di daerah *up land* (dataran tinggi) cenderung lebih miskin dibanding petani yang tinggal di daerah *low land* (dataran rendah). Petani di dataran tinggi rata-rata tidak memiliki alternatif mata pencaharian selain mengolah lahan yang dimilikinya. Berbeda dengan petani yang berada di dataran rendah yang

memiliki alternatif pekerjaan di luar pertanian karena kedekatannya dengan daerah perkotaan.

Petani yang semula memiliki tanah, menjadi tidak punya. Kapitalisme menumbuhkan kelas-kelas sosial. Polarisasi petani masih menyisakan celah untuk mencari makan (petani atau masyarakat pedesaan masih dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya) mengakibatkan sulit munculnya kesadaran kelas petani. Jika pun ada, kesadaran yang muncul belum bersifat kesadaran struktural (suatu kesadaran bahwa masalah mereka disebabkan oleh adanya struktur dan mekanisme sosial yang tidak adil akibat pilihan model pembangunan ekonomi-politik dari negara). Kemiskinan yang mereka pahami lebih berangkat dari kesadaran akan nasib, kebodohan, budaya yang tidak sesuai dengan semangat modern dan kemalasan dari petani itu sendiri. Tulisan Nurjaya (2001) membuktikan hal tersebut dimana didalamnya digambarkan bahwa komunitas desa hutan (magersari) membentuk sikap pasrah dan *nrimo* yang secara moral dikembangkan dari generasi ke generasi.

Struktur masyarakat pedesaan yang dicirikan oleh mata pencaharian petani tanaman pangan, ketetanggaan berdasarkan teritori dan tinggal dekat, budaya tolong menolong, pertanian sawah sehingga ekologi sawah menghasilkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya yang berlangsung sangat intensif sepanjang tahun.

### *Sistem Sosial dan Tradisi Lokal*

Kehidupan petani sebelum terjadi 'penjabelan' sebenarnya sangat dinamis dengan karakteristik sosial yang tumbuh dan berkembang. Sebelum para petani Dusun Gambar melakukan penanaman kebun, biasanya didahului dengan sebuah upacara adat sederhana yang ditujukan untuk menghormati leluhur dan sekaligus memohon restu sang pencipta agar tanaman membuah hasil yang melimpah. Upacara diikuti berbagai kesenian. Pada saat pemanenan, dilakukan upacara sebagai terima kasih atas anugerah.

Kelembagaan dalam bentuk lumbung padi dibangun untuk menampung hasil panen petani dan upaya menghindari panceklik. Namun akibat masuknya

kapitalisme, kelembagaan ini musnah karena petani tidak memiliki hasil panen yang dapat disimpan.

Pengambilalihan lahan tidak hanya merusak tatanan kehidupan alam, namun juga tatanan sosial rakyat. Masyarakat tidak memiliki kemampuan mengembangkan kebudayaan atau mempertahankan tradisi yang selama ini menjadi bagian kehidupan sosial warga. Perangkat dusun seperti *kamituwo* dan *jagabaya* tidak diangkat secara demokratis melainkan ditunjuk dan diangkat oleh NV Gambar dan harus memberikan keberpihakannya pada perkebunan.

#### Munculnya Kemiskinan Struktural Perkebunan

Ciri kapitalisme perkebunan yang dikemukakan oleh Wiradi menciptakan dominasi pemerintah dalam hal ini perkebunan, sehingga akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan tidak lagi sebebaskan ketika lahan tersebut masih dimiliki oleh petani. Ketika lahan sudah tidak lagi menjadi milik masyarakat, ketika itu pulalah kemiskinan muncul. Sebagai akibat keberadaan perkebunan yang menunjukkan kekuasaannya, masyarakat tidak memiliki peluang bekerja. Mereka kemudian menjadi buruh di tanahnya sendiri dan berada dibawah kekuasaan perkebunan sehingga kehidupan petani cenderung termarginalisasi.

Senada dengan yang digambarkan Scott (1993) bahwa kondisi demikian menciptakan pola hubungan patron-klien dimana petani seolah-olah diberi perlindungan, pekerjaan, bantuan yang bersifat moral, dan lain-lain. Pelajaran masa silam tentang hubungan patron-klien yang terbukti menciptakan ketergantungan yang kuat antara klien terhadap patronnya merupakan sebuah nilai yang direfleksikan kembali dalam bentuk lain oleh perkebunan. Masyarakat tersebut seolah-olah diposisikan sebagai komunitas yang tidak memiliki posisi tawar untuk menentukan nasibnya. Terbukti bahwa sekian lama perjalanannya, komunitas tidak mampu menciptakan struktur baru dalam sistem kehidupannya. Mereka tetap 'dikondisikan' dan 'mengkondisikan' diri dalam bentuk keterikatan.

Hubungan patron-klien dalam berbagai bentuk tetap mencirikan bahwa diantara keduanya ada aliran jasa sebagai syarat moral hubungan tersebut. Penghidupan subsistensi dasar, jaminan krisis subsistensi, perlindungan, makelar dan pengaruh, dan jasa patron kolektif merupakan arus patron terhadap klien. Dalam keterbatasan aliran jasa, agak sulit untuk mendefinisikan arus klien ke patron. Namun satu hal yang dapat ditemukan pada arus ini adalah prinsip perbandingan antara jasa yang diterima dari patron dengan jasa yang diberikan oleh klien.

Hubungan patron-klien yang terbentuk baik antara petani dengan perkebunan merupakan bentuk ikatan tradisional yang penting bagi para petani, ikatan-ikatan ini cenderung mengurangi arti sosial dari ikatan horisontal antar petani. Pola keseluruhannya seperti pada feodalisme Eropa Barat, berupa kaum tani yang terpecah-pecah yang terikat secara vertikal oleh kesetiaan terhadap kaum agraris elit yang merupakan partisipan aktif dalam sebuah orde politik oligarkhis (Scott, 1993).

Lebih lanjut Scott memaparkan bahwa dalam hubungan patron-klien, perlawanan timbul dari hal-hal yang spesifik dari kaum tani berupa pajak, akses terhadap lahan, distribusi panen, dsb. Dalam hubungan pertukaran, pelanggaran terhadap kebutuhan minimum akan melemahkan legitimasi dari kelas patron dan memberikan basis moral bagi kaum tani untuk melawan elit agraris.

Dari sisi masyarakat perkebunan banyak contoh kasus kemiskinan struktural muncul sebagai akibat dari pengambilalihan lahan secara paksa oleh perkebunan. Kondisi masyarakat setelah lahan dibawah kekuasaan NV Gambar menjadi tidak menentu. Mata pencaharian yang semula petani dipaksa untuk menjadi buruh tani dengan upah yang jauh di bawah standar. Kesempatan bekerja hanya diperuntukkan bagi warga yang tidak melakukan pembangkangan terhadap perkebunan. Masyarakat dihadapkan pada pilihan tinggal di sekitar kawasan perkebunan dengan menerima resiko bekerja pada perkebunan atau keluar dari kawasan tersebut untuk kemudian bekerja di sektor lain. Pilihan tersebut bukan pilihan yang mudah, karena ketika petani memilih untuk tetap tinggal

maka resiko berada di bawah kekuasaan elit perkebunan akan muncul, sedangkan jika petani keluar dari wilayah perkebunan, petani tidak siap menghadapi pekerjaan yang sama sekali asing dari dunianya.

Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan petani menjadi termarginalisasi, berada di atas tanahnya namun tidak menjadi penguasa di atas tanahnya.

### ***Kasus Kemiskinan Struktural Masyarakat Kehutanan***

#### *Struktur Masyarakat*

Dengan sistem ekonomi subsisten, masyarakat adat sangat tergantung hidupnya pada alam terutama untuk meneruskan hidupnya pada apa yang tersedia di alam. Mereka hidup menyatu dengan alam seperti masyarakat adat Anak Dalam yang masih bermata pencaharian berburu. Setiap masyarakat adat mempunyai pengetahuan lokal dalam memperlakukan alam dan mempunyai sanksi-sanksi tertentu jika sampai merusak alam. Begitu juga halnya masalah tanah yang didalamnya masih terdapat aturan-aturan tertentu mengenai pertanahan.

Bagi masyarakat adat, tanah mempunyai makna yang kompleks. Selain bermakna sosio ekonomis juga bermakna religius. Dalam hal penggunaan dan pengelolaan umumnya mereka tidak mengenal kepemilikan individu. Pada kasus masyarakat kehutanan lazim dikenal adalah penggunaan dan pengelolaan secara komunal yang disebut hak ulayat. Menurut konsep ini semua anggota masyarakat diperbolehkan untuk mempergunakan tanah tersebut secara bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya dengan maksud untuk keberlangsungan hidupnya. Namun kasus lain menunjukkan bahwa ada konsep kepemilikan jika seseorang sudah membuka lahan. Sedangkan hutan yang belum dibuka tetap menjadi milik komunal dengan prinsip *public property*.

Saat Orde lama berkuasa, pemerintah mengeluarkan UUPA No 5 tahun 1960. Dalam UU ini pemerintah mengakui hak ulayat masyarakat adat meskipun tidak terekspresikan secara jelas. Tetapi UU agraria yang dibuat oleh pemerintah Orde

baru semakin tidak memperjelas posisi mereka dalam masalah pertanahan. Apalagi semenjak dikeluarkannya kebijakan agar tanah harus memiliki sertifikat yang menuntut untuk dicantumkan nama pribadi. Berbeda dengan kepemilikan berdasarkan komunal. Tanah komunal tidak mengenal kepemilikan pribadi melainkan milik seluruh anggota masyarakat adat sehingga tidak memakai sertifikat seperti yang diwajibkan oleh pemerintah. Dampaknya kemudian adalah tanah-tanah adat kemudian tergusur bahkan ada yang diakui sebagai tanah negara.

Secara jelas diungkapkan dalam berbagai penelitian bahwa Orang Katu saat ini sudah jarang membuka hutan primer untuk kepentingan perladangan. Mereka umumnya kembali memanfaatkan *lopo ntua* atau *lopo lehe* untuk dijadikan ladang. Pola tenurial yang dikembangkan tidak dengan melakukan praktek jual beli. Petani yang tidak memiliki lahan atau kekurangan dipinjami lahan, sehingga stratifikasi sosial tidak tampak. Dengan sistem penguasaan lahan seperti itu tidak ada praktek jual beli tanah antar sesama terlebih dengan orang luar. Cara ini menyebabkan peralihan hak atas tanah kepada orang lain tidak terjadi. Sistem ini berandil besar dalam melestarikan lingkungan hutan disekitarnya karena tidak terjadinya pembukaan lahan baru di kawasan konservasi.

Bentuk akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dilakukan oleh komunitas *enclave* melalui tahapan-tahapan tertentu. Sebagai komunitas yang berada di dalam hutan, pilihan-pilihan untuk menciptakan alternatif ekonomi agak sulit digambarkan. Kondisi dan sarana serta prasarana yang mendukung pilihan untuk bekerja pada sektor lain lebih sulit untuk dilakukan.

Beratus-ratus tahun komunitas yang hidup di dalam hutan membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya agraria, yang berlandaskan pada rasionalitas ekonomi, budaya, hukum, ekologi, bahkan politik mereka sendiri. Penting untuk dilihat pemahaman mereka dalam hal sistem *land tenure* dan pola-pola penggunaan sumberdaya agraria.

Pengalaman komunitas ini merupakan contoh pandangan ekologi sosial yang menganggap penjaga terbaik hutan-hutan

adalah masyarakat di sekitar hutan. Sebagai paralelnya adalah pandangan ekopopulis yang menghargai pengalaman dan pengetahuan masyarakat di sekitar hutan. Gambaran kehidupan Orang Katu dapat dilihat melalui berbagai kelembagaan yang terbentuk.

#### Sistem land tenure

Komunitas Orang Katu berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulawesi Tengah. Dalam komunitas ini pembagian zonasi menunjukkan status kepemilikan komunitas atas tanah. Pemilikan tersebut dimulai ketika seseorang membuka hutan (*pandulu*) untuk dijadikan ladang (*hinoe*). Secara sosial budaya proses membuka hutan merupakan dasar dari pemilikan tanah, maka sangat penting memahami bagaimana komunitas ini mengelompokkan hutan dan kegunaan hutan.

Bagi Orang Katu, cara lain untuk memperoleh hak atas tanah adalah melalui warisan orang tua. Pola pewarisan dilakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. Anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama. Dalam banyak kasus, anak yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat banyak mengurus atau merawat orang tua kerap memperoleh tanah yang lebih luas. Biasanya anak semacam ini tinggal bersama orang tua dan umumnya sudah berkeluarga. Keputusan orang tua memberi lahan yang lebih luas tidak menjadi persoalan bagi anak lain.

Jika dalam perkawinan terjadi perceraian atau kematian sedangkan salah satunya menikah lagi maka lahan hasil perkawinan pertama akan diwariskan kepada anak hasil perkawinan pertama. Sedangkan pasangan baru akan membuka lahan kembali untuk kemudian nantinya akan diwariskan kepada anak dari hasil perkawinan kedua. Pembagian tanah atas dasar warisan nilai-nilai budaya ini sangat egaliter dan universal sifatnya.

Praktek pinjam meminjam tanah berlaku di komunitas ini terbatas pada tanah yang ditanami dengan tanaman semusim. Untuk tanah yang ditanami tanaman keras tidak berlaku hal demikian. Bagi Orang Katu dengan menanam tanaman keras seperti kopi dan coklat, hal tersebut sekaligus

menegaskan pemilikan tanah secara permanen. Praktek lain adalah tukar menukar lahan garapan (akibat sistem perladangan berpindah) dengan lahan yang berdekatan dengan tempat tinggal.

#### Corak pertanian

Pertanian yang dominan dilakukan Orang Katu adalah berladang tentunya yang dilakukan pada zonasi yang telah ditetapkan. Perbedaan zonasi berpengaruh pada komoditas yang mereka tanam. Artinya, mereka telah memahami betul kondisi lahan yang benar-benar produktif untuk tanaman tertentu. Pola perladangan berpindah yang dilakukan membutuhkan waktu sekitar 9-12 tahun. Praktik perladangan yang dilakukan menunjukkan bahwa kebutuhan lahan mereka relatif konstan (tetap). Selain berladang, Orang Katu juga menerapkan pertanian bersawah dan tanaman keras. Seiring dengan perkembangan pengetahuan, Orang Katu berusaha untuk membangun persawahan dengan menggunakan teknologi yang sederhana baik dalam hal teknologi pengolahan tanah maupun pengadaan sarana irigasi.

Mata pencaharian Orang Katu dilakukan melalui konsep harmonisasi dengan alam dan lingkungan. Harmonisasi yang mereka ciptakan telah menimbulkan imajinasi dan kearifan tersendiri sehingga menimbulkan peradaban besar untuk tidak semena-mena dengan alam.

#### Pembagian kerja: kolektivitas kelompok

Aspek yang paling penting dalam kehidupan Orang Katu adalah mereka memiliki semangat kolektif/kelompok yang sangat kuat. Hampir semua kegiatan ekonomi dan sosial Orang Katu dilandasi dengan semangat ini. Semangat Orang Katu dilembagakan dalam kelompok-kelompok kerja. Orang Katu membagi diri mereka ke dalam 4 (empat) jenis kelompok kerja yaitu; kelompok kerja yang didasarkan pada rumah tangga/kepala keluarga; kelompok kerja ibu; kelompok kerja bapak; dan kelompok kerja pemuda. Kelompok-kelompok ini mengerjakan banyak hal antara lain berladang, bersawah, memungut hasil hutan, membangun rumah, melakukan kebaktian, dan memberikan pelayanan makanan dan akomodasi terhadap setiap pengunjung. Kecuali memungut hasil hutan dan

pembangunan rumah, kelompok ibu terlibat dalam kerja-kerja diatas.

Ketika membuka ladang maka tenaga kerja akan diambil dari kelompok-kelompok tadi untuk kemudian bekerja secara gotong royong. Pemilik tanah akan memberi imbalan kepada kelompok dalam bentuk uang tunai atau natura namun tidak ada istilah upah. Bantuan kelompok juga diberikan kepada seseorang yang telah memberikan hewan piaraan untuk kepentingan Orang Katu secara keseluruhan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tenaga jika orang yang bersangkutan hendak membuka ladang, sawah atau membangun rumah.

#### Munculnya Kemiskinan Struktural

Akar masalah yang menimbulkan kemiskinan struktural adalah tertutupnya akses informasi kebijakan tentang sumberdaya hutan kepada masyarakat adat. Masalah tersebut memunculkan isu strategis yakni membangun kembali nilai-nilai budaya yang berkembang, perubahan kebijakan konservasi, kultur perhutani menutup akses terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, serta adanya eksploitasi terhadap sumberdaya hutan.

Ketika keputusan penetapan kawasan taman nasional, kondisi masyarakat berubah. Mereka dilarang mengambil sumberdaya hutan yang selama ini mereka gunakan sebagai sumber mata pencaharian dan mempertahankan hidup. Mengambil kayu sudah tidak bisa dilakukan karena akan dikenakan sanksi oleh pemerintah, sehingga kondisi Orang Katu terpuruk. Sejak penetapan kawasan hutan menjadi kawasan suaka margasatwa pun (sebelum kemudian ditetapkan sebagai taman nasional), Orang Katu sudah dibatasi aksesnya untuk memasuki wilayah-wilayah hutan. Petugas kehutanan menekan penduduk untuk tidak melakukan kegiatan perburuan dan melarang mereka memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Akibatnya sudah dapat dipastikan bahwa sejak tahun 1973 masyarakat mengalami kekurangan akibat tertutupnya sumber kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan struktural masyarakat hutan terjadi pada berbagai sektor yaitu politik hukum, ekonomi, sosial budaya. Pada

kasus kehutanan, hal tersebut dibuktikan melalui:

1. Bidang politik hukum: adanya rasa takut dalam mengekspresikan kepentingan masyarakat lokal, tertutupnya akses informasi, hilang atau ditutupnya akses masyarakat terhadap hutan (informasi, kebijakan, dll), tertutupnya akses dalam proses pengambilan keputusan, perampasan hak individu dan kolektif, pengabaian pengetahuan lokal, perampasan hak akses pada sumber daya hutan atau agraria, pengabaian hukum adat dan institusi adat, dan hilangnya sumber-sumber pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Bidang ekonomi; kehilangan mata pencaharian, kemiskinan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, tidak punya lahan untuk bertani, hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal, dll
3. Bidang sosial budaya, menurunnya rasa solidaritas, persaudaraan, dan rasa senasib, menurunnya rasa penghargaan dan kebersamaan, keharusan mengganti mata pencaharian, dan kehilangan hutan rimba

Kemiskinan yang muncul tersebut membuktikan bahwa pengaruh intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan sama sekali tidak menjadikan segalanya menjadi lebih baik. Masyarakat lokal yang selama ini memperoleh pemenuhan kebutuhan dari hutan merasa disingkirkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kemiskinan yang timbul merupakan kemiskinan yang diciptakan oleh penguasa (negara).

#### **Respon Atas Kemiskinan Struktural**

Perebutan sumber daya alam dan interaksi antar stake holder memicu lahirnya gerakan sosial yang merupakan upaya pemenuhan tuntutan keadilan bagi golongan yang merasa tersisihkan. Secara umum, tampak adanya pola pengorganisasian masyarakat yang cenderung berkembang sebagai akibat dari dua faktor yakni gejala kerusakan lingkungan terutama karena tindakan manusia terhadap lingkungannya yang semakin eksploitatif dan semakin sempitnya kesempatan kerja di pedesaan. Dua hal tersebut memicu kesadaran petani

dan alur pemikiran kritis bahwa kondisi tersebut harus disikapi secara bersama-sama dan dalam bentuk perjuangan.

Baik struktur masyarakat kehutanan maupun perkebunan, kemiskinan struktural menghasilkan reaksi petani berupa gerakan perlawanan dalam tujuan mendobrak ketimpangan akses yang terjadi pada komunitas tani. Gerakan perlawanan diwujudkan melalui pembentukan organisasi tani dimana melalui organisasi yang terbentuk petani dapat mengembangkan jejaring sosial dengan cara membentuk aliansi dengan institusi yang diharapkan dapat menjadi katalis bagi terciptanya kesamaan akses serta hilangnya ketimpangan sosial.

#### ***Persoalan agraria sebagai akar konflik***

Dalam kegiatan usaha tani, pengelolaan lahan (tanah) merupakan salah satu objek kelembagaan yang penting karena merupakan salah satu input produksi. Selain itu menurut Sajogyo (1983), lahan bagi petani adalah modal (asset) sumber nafkah yang menentukan posisi rumah tangga petani dalam pelapisan masyarakat desa. Modal lahan menentukan kemampuan jangkauan petani terhadap pangan, perumahan, pendidikan dan unsur kesejahteraan. Bahkan menurut Soemardjan (1980) ketimpangan distribusi penguasaan lahan merupakan sumber utama kemiskinan struktural didalam masyarakat yang bersangkutan (Fadjar, dkk).

Nasib petani relatif belum berubah semenjak kolonialisme dimana petani hanya merupakan objek eksploitasi yang terjadi dalam berbagai cara produksi. Cara produksi yang eksploitatif ini pada tingkat masyarakat membangun apa yang biasa disebut sebagai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses penggolongan didalam masyarakat berdasarkan penguasaan terhadap alat-alat produksi dan modal, termasuk tanah didalamnya (Arif dalam Fauzi, 2003).

Persoalan-persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan dalam konteks negara dan bangsa Indonesia yang sangat kaya dengan sumber-sumber agraria berpangkal pada adanya ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang secara sengaja dibiarkan berkembang di dalam kehidupan bernegara. Dipicu oleh

kondisi tersebut, masyarakat kemudian berusaha untuk memperjuangkan lahan yang dimilikinya.

#### ***Perlawanan dalam Diam***

Sebelum masyarakat mengenal apa yang disebut gerakan petani dan membentuk jaringan, masyarakat melakukan perlawanan tersembunyi terhadap penguasa atau pengusaha yang menjadi musuh mereka. Perlawanan dilakukan tidak dengan cara bertrokan fisik, namun lebih kearah perlawanan halus, misalnya dalam bentuk tidak mematuhi peraturan, membantu bandit sosial, perlawanan dalam diam atau perlawanan dalam kepatuhan.

Model perlawanan tersebut pada beberapa kasus muncul, misalnya pada komunitas Mikung di Tasikmalaya, melakukan perlawanan tersembunyi melalui sindiran halus, ungkapan cemoohan terhadap penguasa desa yang hanya dimengerti oleh kelompok miskin (Samandawai, 2001). Upaya sabotase yang diwujudkan berimplikasi terhadap pembangunan yang selalu mengalami hambatan. Sikap dan perilaku perlawanan yang dilakukan petani dinilai pemerintah merupakan wujud dari kebodohan, kurangnya pendidikan, ketidaktahuan terhadap pembangunan, atau sikap kolot yang tidak mau menerima kemajuan.

Sektor kehutanan juga memperlihatkan akibat dari ketidakadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil. Ketidakadilan tersebut direspon dengan berbagai perlawanan halus melalui protes-protes sosial masyarakat desa hutan. Protes-protes sosial muncul dengan berbagai varian, mulai dari *saminisme*, *hidden transcript* (perlawanan terselubung seperti menggunakan olok-olok atau pembangkangan) hingga *banditisme* hutan (Awang, 2003).

#### ***Terbentuknya organisasi: 'mengorganisir diri' atau 'diorganisir oleh kelompok elit'***

Pengorganisasian sosial pertanian di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir didorong oleh dua faktor yaitu:

1. Gejala kerusakan lingkungan terutama karena tindakan manusia terhadap lingkungannya yang makin eksploitatif

dan semakin sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.

2. Munculnya kesadaran masyarakat atas hak-haknya terhadap sumberdaya yang ada di sekitarnya yang bermuara kepada tuntutan pengakuan hak ulayat kepada pemerintah.

Dalam komunitasnya, masyarakat mengembangkan konsolidasi untuk melawan struktur yang memarjinalkan kehidupan mereka. Perlawanan dalam diam, dalam berbagai bentuknya menunjukkan bahwa sesungguhnya anggota komunitas mampu mengorganisir diri dalam struktur masyarakat yang kuat. Kepemimpinan lokal dan kelompok elit mampu menggerakkan anggota komunitas untuk melakukan sabotase-sabotase, perlawanan halus yang menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam dalam situasi terjajah. Kesadaran kritis bisa didapat dari kelompok elit mereka. Coba lihat di kelompok elit dan hubungan sosial di pedesaan

Dalam konteks perlawanan fisik dan organisasi yang lebih terstruktur, organisasi petani lebih dipengaruhi oleh masuknya idealisme yang biasanya datang dari NGO's atau pihak lain. Petani terlibat dengan jaringan bisa karena mereka berusaha membuat aliansi dengan pihak lain. Dalam konteks ini, petani memainkan peran pemimpin lokal untuk dapat menentukan tujuan bersama. Inisiatif membentuk jaringan juga bisa muncul dari kepedulian NGO's dalam membantu perjuangan petani.

#### Varian tipe organisasi berdasarkan komunitas

Kasus pengorganisasian di desa perkebunan memiliki tipe organisasi sosial pertanian yang didukung oleh sistem agribisnis pertanian pangan, di daerah sekitar perkotaan dan daerah padat penduduk, budaya organisasi sosial relatif kuat, dan didukung oleh lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional. Organisasi sosial pertanian seperti ini memerlukan dukungan pengembangan kapasitas berorganisasi serta pengembangan kemampuan teknik-teknik pemulihan kesuburan.

Alasan petani mengorganisir sekaligus diorganisir oleh orang lain disebabkan beberapa hal. Banyak literatur

menerangkan bahwa interaksi manusia dengan sumberdaya alam di Indonesia terkait dengan faktor sistem ekologi, pola kepemilikan, dukungan organisasi luar komunitas, keberadaan lembaga adat dan perilaku pasar. Pada komunitas masyarakat perkebunan dan kehutanan faktor-faktor tersebut berbeda cirinya sehingga melahirkan proses pengorganisasian yang berbeda.

Peran kelompok elit desa yang merupakan pendiri desa sekaligus pernah memiliki lahan yang luas dalam memunculkan gagasan tentang perlawanan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Kondisi tersebut ditambah dengan masukan dari golongan warga yang telah memiliki kesadaran akan pendidikan sehingga kritis dalam mengajukan pendapat. Seperti halnya tulisan Amin, (1988) bahwa setiap masyarakat terdapat kelompok-kelompok elit yang mempunyai pengaruh dan sangat berarti bagi masyarakatnya. Pendapat, keputusan dan tindakan mereka mempunyai akibat yang penting dan menentukan. Elit ini terdapat dalam agama, politik, ekonomi, militer, adat dan sebagainya. Pada dua komunitas perbedaan ada pada golongan kelompok elit yang dimaksud. Untuk kasus desa perkebunan, kelompok elit yang berupaya membangkitkan kesadaran adalah kelompok agama dan politik, sedangkan pada kasus masyarakat desa hutan, kelompok elit yang berperan lebih pada pemuka adat.

Tipe organisasi yang muncul dipengaruhi oleh sistem ekologi yang ada pada struktur dasar masyarakat perkebunan yakni berciri ekologi sawah dengan ciri-ciri:

1. Dalam ekologi sawah interaksi manusia dengan lingkungannya berlangsung sangat intensif sepanjang tahun.
2. Ada hubungan sosial berdasarkan keterikatan antar petani dengan sumber air irigasi.
3. Kepemilikan jelas (kepemilikan individu), masyarakat memiliki petok D, yaitu bukti pembayaran pajak

Warga komunitas perkebunan memperjuangkan hak atas tanah melalui cara-cara yang lebih keras, berangkat dari tercerabutnya keteraturan yang biasa mereka jalani. Prinsip modal sosial tetap digunakan dimana dalam kasus konflik, petani

membangun strategi yaitu melibatkan berbagai stake holder dari mulai lapisan atas hingga lapisan bawah. Strategi yang diterapkan adalah serangan langit dan serangan akar rumput. Serangan langit merupakan pekerjaan perwakilan perjuangan yang memfokuskan kegiatan pada level *lobbying*. Serangan ini dilakukan mulai dari birokrasi paling rendah hingga tingkat pusat.

Sedangkan serangan akar rumput lebih ditujukan pada strategi memperkuat basis perjuangan petani lokal yang ditujukan untuk meyakinkan akan kebenaran perjuangan, memperkuat pemahaman keluarga rakyat petani akan hak-haknya secara dialogis, memperkuat keberadaan tradisi komunal (kebersamaan) yang sempat dihancurkan, menggalang kawan serta menciptakan kepedulian atas nasib petani.

Tipe organisasi sosial pertanian pada komunitas kehutanan memiliki varian yang lebih banyak, diantaranya perbedaan karakteristik etnis, ekologi, keterbatasan lahan, berkembang karena tuntutan pemulihan ekologi dan peningkatan kesejahteraan penduduk, didukung oleh organisasi/LSM lokal, organisasi adat dan organisasi birokrasi lokal. Organisasi sosial pertanian seperti ini membutuhkan pendampingan dalam hal sistem agroforestri berskala kecil/individual.

Untuk kasus masyarakat kehutanan, pengorganisasian yang dilakukan memiliki karakteristik seperti di bawah ini:

1. Bentuk pengorganisasian bervariasi, tergantung pada proses-proses yang terjadi antara negara dan masyarakat
2. Dalam konteks batas hutan negara dan lahan masyarakat jelas, melahirkan organisasi formal, misalnya KTH. Dalam konteks dimana batas-batas antara hutan negara dan lahan masyarakat tidak jelas, hubungan sosial lebih didasarkan pada ikatan adat atau kemungkinan munculnya hubungan sosial disosiatif antara negara dan masyarakat
3. Kepemilikan lahan bersifat komunal, milik adat atau komunitas

Dalam menciptakan gerakan, petani menggunakan prinsip modal sosial yang diperkenalkan oleh Fukuyama (2001). Modal sosial didefinisikan sebagai norma informal yang membina hubungan

kerjasama antara dua atau lebih individu. Doktrin dimasukkan sebagai unsur pengikat dalam hubungan timbal balik dalam upaya mempererat makna resiprokal. Pada kasus masyarakat kehutanan (Orang Katu), program pemerintah tentang taman nasional direspon dengan melakukan konsolidasi antar warga. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membuat pemetaan partisipatif dan rekognisi. Orang Katu menganggap bahwa peniadaan hak-hak tenurial tersebut harus dilawan dengan akal sehat. Membangkitkan akal sehat dan pengetahuan Orang Katu tentang hak tenurialnya dilakukan dengan cara membuat peta partisipatif yang berisi pola kekuasaan mereka atas ruang. Peta mental (*cognitive maps*) yang selama ini menjadi pengetahuan Orang Katu menggambarkan di mana lokasi mereka berladang, tempat berburu, pengambilan kayu, tempat tumbuhnya tanaman obat, dsb. Orang Katu mulai membentuk jaringan kepercayaan dengan unsur luar dalam hal ini LSM untuk dapat membuat peta partisipatif.

#### ***Dampak terhadap struktur sosial***

Perubahan yang justru terlihat pada kasus petani Blitar adalah ketika tanahnya berhasil diduduki. Kelembagaan mulai dimunculkan dalam bentuk kegiatan pengajian yang didalamnya disisipkan kajian atau diskusi rutin tentang perkembangan kasus tanah. Meskipun saat ini mereka sudah berhasil menduduki lahan garapan namun banyaknya ancaman menjadikan petani waspada terhadap segala kemungkinan yang mungkin timbul.

Warga Dusun Gambar sepakat untuk mengadakan pemilihan perangkat dusun baru secara demokratis. Perangkat Dusun Gambar ini secara fungsional berbeda peran. *Kamituwo* adalah tetua dusun yang memiliki tugas untuk memimpin dusun, *Jagabaya* bertugas mengamankan situasi keamanan dan ketertiban dusun. Rukun warga adalah perangkat yang membantu tugas *kamituwo* untuk keperluan pengaduan-pengaduan rakyat, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Dusun) Gambar yang merupakan perwakilan dusun tertinggi yang bertugas mengawasi, memberi masukan maupun teguran kepada *kamituwo*, *jagabaya*, dan *rukun warga*.

Setelah mengefektifkan perangkat baru, rakyat petani kini juga menghidupkan kembali tradisi lama seperti *lumbung desa*, kesenian tradisional, upacara-upacara atau *selamatan dusun*. Tradisi ini memiliki nilai strategis dalam rangka memperkuat barisan solidaritas keluarga petani.

Pada kasus masyarakat hutan, perjuangan petani bermuara pada diakuinya keberadaan komunitas tersebut meskipun baru pada tingkat lokal (Kepala Balai TNLL mengakui keberadaan Orang Katu). Orang Katu diperbolehkan mengelola hutan sekaligus tinggal dalam kawasan TNLL dengan menyusun konsep manajemen yang jelas yang berbasis *resources management*. Komunitas lokal berusaha mengembangkan prinsip-prinsip pengelolaan tenurialnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Patut digaribawahi adalah masyarakat di dalam maupun luar hutan merupakan entitas yang mandiri, dengan demikian memerlukan wacana kebijakan tersendiri

## KESIMPULAN

Kemiskinan struktural tak dapat dipungkiri muncul pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh struktur masyarakat yang memberi peluang terciptanya ketimpangan akses terhadap sumberdaya yang dilakukan oleh kelompok elit. Kondisi tersebut memicu termarjinalisasinya masyarakat tertentu sehingga mereka tidak memiliki posisi tawar terhadap berbagai situasi yang muncul.

Dalam konteks masyarakat desa perkebunan dan desa hutan, kemiskinan diciptakan melalui paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berbasis masyarakat lokal. Paradigma yang dipilih pemerintah tersebut memberi peluang kaum kapitalis untuk semakin kokoh menancapkan kekuasaannya di atas posisi masyarakat. Dalam berbagai bentuknya, kondisi tersebut menghasilkan keterpurukan kalangan petani.

Respon yang muncul sebagai akibat kondisi tersebut adalah penggalangan kekuatan yang dilakukan anggota komunitas melalui peran kelompok elit. Kelompok elit disini diartikan sebagai golongan dalam masyarakat yang lebih dahulu mendapat kesadaran bahwa kemiskinan yang muncul

tidak semata-mata faktor nasib melainkan karena struktur sosial masyarakat yang tidak mendukung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk perlawanan mandiri komunitas dan dalam perjalanannya didukung oleh pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan petani

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: CCSS.
- De Soto, Hernando. 2001. *The Mystery of Capital: With Capitalism Triumph in the West and Fails Everywhere Else*. London: Black Swan.
- Eric wolf. 1985 *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fadjar, U., dkk. 2002. *Penduduk, Kebun Karet dan Kemiskinan*. Bogor: LRPI.
- Faudji, Noer. 2003. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria: dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fukuyama, Francis. 2001. *Social Capital, Civil Society And Development*. *Third World Quarterly*, Vol 22, No 1, pp 7– 20, 2001.
- Kartasubrata, Junus. 1999. *Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan: Beberapa Studi Kasus di Jawa dan Luar Jawa*. Proceedings Kongres Kehutanan Indonesia. Buku VI Sidang Kelompok V Sumber Daya Manusia. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya.
- Kikis. 2000a. *Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural. Focal Point Masyarakat Hutan*. KIKIS-KPSHK-The Ford Foundation. Laporan Dialog Kemiskinan. Jawa Barat.
- Kikis. 2000b. *Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural. Focal Point*

- Masyarakat Lahan Kering*. LP2ES-Mataram, The Ford Foundation. Laporan Dialog Kemiskinan Bali.
- Nurjaya, IN. 2001. *Magersari: Studi Kasus Pola Hubungan Kerja Penduduk setempat dalam Pengusahaan Hutan*. Disertasi. UI. Depok.
- Pelzer, Karl. Z. 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Perdana, Herlambang. 1999. *Serangan Akar rumput di kaki Gunung Kelud dalam buletin petani*. Edisi No. 2/1, Desember 1999.
- Samandawai, Sofwan. 2001. *Mikung: Bertahan dalam Himpitan (Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya)*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Sangiaji, Arianto. 2002. *Politik Konservasi Orang Katu di Behoa Kakau*. Bogor: KpSHK.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James C. 1994. *Moral Ekonomi Petani*. Terj. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sitorus, MTF. 2002. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Akatiga.
- Suhendar, Endang., Yohana Budi Winarni. 1997. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.
- Tauhid, M. 1953. *Masalah tanah: sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*.